



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THOLIB  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal

RAZILU  
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

THOLIB  
NIP.19630811 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-1 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-2 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
SP-3 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	92 %
	4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	92 %
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	6 %
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	66,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
SK-13	Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	satu Rekomendasi
		2. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	66,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
SK-14	Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	14,17
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,88
		3. Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Level 3 (Terdefinisi)
SK-15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	82 %
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	3
SK-16	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	82 %
SK-17	Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	85 %
		2. Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarana Prasarana Internal	12 bulan layanan
SK-18	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	87 %
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	95 %

Sumber data :

1. Hasil Berita Acara penilaian SAKIP ITJEN Th.2020 bahwa Tim ITWIL I merekomendasikan agar IKU "Indeks Persepsi Integritas" diturunkan ke Perjanjian Kinerja Sekretaris ITJEN; dan
2. Hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, DJA Kemenkeu dan Kemenkumham (ITJEN dan Biro perencanaan SETJEN) tanggal 28 Oktober 2021 bahwa menyetujui penambahan satu IKK pada Sekretariat ITJEN.

No.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp.34.749.348.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-13) Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Rp. 500.000.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-14) Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Rp. 1.862.565.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-15) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	Rp. 1.100.162.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-16) Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	Rp. 508.928.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-17) Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	Rp. 30.307.497.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-18) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	Rp. 470.196.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Revisi ke 7 Th.2021

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,  
Sekretaris Inspektorat Jenderal




RAZILU  
NIP.19651128 199103 1 002

THOLIB  
NIP.19630811 198811 1 001

Ket :  
SP-3 diturunkan ke SK-13, SK-14, SK-15, SK-16, SK-17 dan SK-18